

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG

Oleh: Hafiz Gilang Setia Pramana, R. Slamet Santoso

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS LMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Market Utilization Policy in Semarang City which has formulated in local Regulation of Semarang City Number 9 of 2013 concerning traditional market arrangement is an effort of Semarang City Government to create tidy, safe, clean and healthy traditional market; intensify services to the community and make the traditional market as main revenue to the local economy. Aside from being the capital city in the province of Central Java, Semarang City is also the center of trading among small towns around it, such as Demak, Kendal, Kudus, Pati and others. So the city must manage the traditional market maximally. therefore The focus of this research is about the implementation of market utilization policy in Semarang City. This research purposes are describing the implementation of market utilization policy and also to know the determinant factors of successful implementation of market utilization policy in Semarang City.

This research is descriptive qualitative research. Data collection is done by observation, documentation studies and in-depth interviews from informants who is involved in the implementation policy of market utilization in Semarang city. The result of this research is that the implementation of market utilization policy in Semarang City is not maximized, it is caused by several factors that obstruct the implementation policy, such as the existence of market traders who do not obey the regulation policy, limited budget and minimum number of agents compared with the masive market trader.

Based on the reserach result, the researchers suggested that there must an inhancement in optimizing the determinants factors of the implementation of market utilization policy in the city of Semarang which still considered deficient. Suggestions given by researchers are expected to assist the government in the implementaton policy. So that the implementation of market utilization policy in Semarang City can run more effectively and efficiently.

Keywords: policy, market utilization, traditional market

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah memiliki potensi perdagangan yang cukup baik yang mengarah pada potensi pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan penyumbang dan dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang yang berasal dari retribusi pasar.

Pemerintah Kota Semarang harus dapat mengelola pasar tradisional dengan optimal. Untuk mengelola pasar tradisional Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Dalam pelaksanaan kebijakannya ternyata masih belum optimal. Karena masih banyak pedagang yang tidak mentati peraturan dalam kebijakan tersebut dan masih ditemui kondisi bangunan dan fasilitas pasar tradisional yang tidak terawat.

B. TUJUAN

1. Menilai keefektifan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.
2. Mengetahui pengaruh faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

C. TEORI

I. Administrasi Publik

Barton & Chappel melihat bahwa administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. (Keban 2008:5)

Nicholas Henry memberikan batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah. (Keban 2008:5)

II. Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (Subarsono 2012: 2)

James Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. (Subarsono 2012:2)

III. Implementasi Publik

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. (Winarno 2007:146)

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada. (Keban 2008: 67)

IV. Model Implementasi

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *top-down*. Dalam implementasi kebijakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, kondisi sosial politik dan ekonomi, dan standar dan sasaran kebijakan. Keenam faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena memiliki keterkaitan yang kuat.

D. METODE PENELITIAN

I. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan informasi sesuai dengan variabel pada saat penelitian.

II. Situs Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Sehingga lokus yang diambil adalah Dinas Pasar Kota Semarang.

III. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut dengan istilah informan, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang;
2. Kepala Seksi Penataan dan Pemetaan Dinas Pasar kota Semarang
3. Kepala Seksi Pemeliharaan bangunan Dinas Pasar Kota Semarang;
4. Pedagang pasar tradisional di Kota Semarang;
5. Pengunjung pasar tradisional.

IV. Fenomena Penelitian

1. Keefektifan Implementasi

Untuk menilai keefektifan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang, yang diamati antara lain:

- 1) Ketepatan kebijakan
Fenomena yang diamati sebagai berikut:
 - a. Tingkat capaian tujuan dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
 - b. Tingkat pemecahan masalah yang ada dalam pengaturan pasar

tradisional di kota Semarang.

- 2) Ketepatan Pelaksana
Fenomena yang diamati sebagai berikut:
 - a. Tingkat ketepatan aktor yang terlibat dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
 - b. Pengaruh aktor yang terlibat dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- 3) Ketepatan Target
Fenomena yang diamati sebagai berikut:
 - a. Tingkat Ketepatan target dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
 - b. Tingkat kesiapan target dalam intervensi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- 4) Ketepatan Lingkungan
Fenomena yang diamati sebagai berikut:
 - a. Tingkat interaksi antara lembaga perumus kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dan pelaksana kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dengan lembaga lain yang terkait.
 - b. Tingkat persepsi publik, lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, serta individu yang dapat memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional dan implementasi kebijakan tersebut.

5) Ketepatan Proses
Fenomena yang diamati sebagai berikut:

- a. Tingkat pemahaman dan kesiapan publik terhadap kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- b. Tingkat pemahaman pemerintah terhadap kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

2. Faktor – Faktor Penentu Implementasi

1) Komunikasi

Fenomena yang diamati sebagai berikut:

- a. Tingkat transmisi dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- b. Tingkat kejelasan dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- c. Tingkat konsistensi dari para pelaksana stakeholder dalam mengimplementasikan
- d. kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

2) Sumberdaya

Fenomena sebagai berikut:

- a. Tingkat dan kuantitas staf dan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- b. Kualitas dan kuantitas fasilitas yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

3) Disposisi

Fenomena sebagai berikut:

- a. Sikap yang dimiliki para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- b. Respon dari para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

4) Struktur Birokrasi

Fenomena yang diamati sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas prosedur operasi yang standar (*standar operating procedure* atau SOP) struktur organisasi dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- b. Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Fenomena yang diamati sebagai berikut :

- a. Tingkat dukungan sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- b. Tingkat dukungan kelompok-kelompok kepentingan terhadap implementasi

kebijakan pengaturan pasar tradisional di
c. Tingkat dukungan elite politik terhadap implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

- 6) Standar dan Sasaran Kebijakan
Fenomena yang diamati sebagai berikut:
- Kualitas standar kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
 - Ketepatan sasaran kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

V. Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis-jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Kata-kata dan Tindakan
- Sumber Tertulis
- Foto
- Data Statistik

VI. Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

VII. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

VIII. Analisis dan Interpretasi Data
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

kota Semarang.

IX. Kualitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian implementasi kebijakan pemanfaatan pasar di Kota Semarang berdasarkan dengan hasil wawancara dari beberapa informan dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai keefektifan dan faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Keefektifan Implementasi Kebijakan

a. Ketepatan Kebijakan

Hasil penelitian mengenai aspek ketepatan kebijakan, perumusan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah disesuaikan dengan karakter permasalahan yang ada. Beberapa program kebijakan tersebut sudah direalisasikan, tapi ternyata masih banyak kondisi pasar yang berantakan, kotor dan pemeliharaan bangunan pasar pun juga belum maksimal. Jadi sejauh ini dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dinilai belum dapat menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga ketepatan kebijakan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang sudah tepat, namun dalam pemecahan masalah masih kurang optimal.

b. Ketepatan Pelaksana

Aktor kebijakan utama implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah Dinas Pasar Kota. Demi kelancaran implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang Dinas Pasar Kota Semarang dibantu oleh beberapa dinas terkait, seperti Dinas

Kebersihan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup. Tidak hanya dari dinas terkait saja, organisasi

c. Ketepatan Target

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa target dari implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah seluruh pedagang di pasar tradisional Kota Semarang.

Berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber, pihak implementor mengatakan bahwa target dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah siap diintervensi karena target tersebut mau untuk mengikuti aturan kebijakan tersebut. Namun ternyata saat peneliti melakukan wawancara kepada pedagang (target) ternyata berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh implementor, mereka mengaku bahwa sebenarnya belum siap melaksanakan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

Ketepatan target dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang targetnya sudah tepat. Namun, target tersebut belum siap diintervensi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan internal implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dapat dinilai dari interaksi Dinas Pasar Kota Semarang dengan Dinas lain yang terkait dan organisasi perkumpulan pedagang pasar dengan cara koordinasi, namun

perkumpulan pedagang pasar pun juga ikut terlibat sesuai dengan kepentingannya.

koordinasinya masih perlu ditingkatkan.

Lingkungan eksternal implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dapat dinilai dari bagaimana persepsi masyarakat dan pedagang mengenai kebijakan tersebut. Masyarakat memiliki persepsi implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang akan memberikan dampak yang baik jika dilaksanakan dengan benar. Namun pedagang memiliki persepsi yang berbeda, pedagang menganggap implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang akan merugikan pedagang karena pemindahan lapak dagang akan mengurangi pelanggan. ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional sudah tepat. Walaupun koordinasi antar aktor kebijakan masih belum optimal dan pedagang masih memiliki persepsi yang negatif.

e. Ketepatan Proses

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Pasar Kota Semarang menjelaskan mengenai proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, yaitu dimulai dari identifikasi, sosialisasi lalu pelaksanaan. Namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada pedagang dan masyarakat, ternyata mereka tidak

memahami kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

Pedagang belum siap untuk melaksanakan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang karena harus pindah tempat berjualan dan harus mengurus beberapa hal untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Peneliti menilai bahwa ketepatan proses dalam implementasi kebijakan pemanfaatan di Kota Semarang masih kurang tepat. Karena dalam sosialisasi dan pelaksanaan kebijakannya kurang optimal.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Kebijakan pemanfaatan pasar di Kota Semarang ditransmisikan oleh Dinas Pasar Kota Semarang kepada pedagang pasar dengan cara sosialisasi. Karena banyaknya jumlah pedagang di pasar sosialisasi dilakukan hanya kepada perwakilan pedagang. Informasi yang didapat oleh perwakilan pedagang disalurkan lagi kepada pedagang-pedagang di pasar. Namun dalam penyaluran informasi tersebut berjalan lambat dan masih ada pedagang yang tidak mendapatkan informasi tersebut sehingga tingkat kejelasan informasi tersebut menjadi berkurang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang dirasa masih belum konsisten melihat kenyataan dilapangan, pedagang jarang mendapatkan pengarahan dari pihak terkait,

Peneliti menilai bahwa komunikasi menjadi pengaruh negatif dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

b. Sumberdaya

Staf dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang memiliki kualitas yang sudah cukup baik, karena setiap staf sudah menguasai bidangnya masing-masing dalam menjalankan tugas. Namun dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa jumlah staf dalam implementasi kebijakan tersebut masih kurang. Fasilitas dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dirasa masih kurang dikarenakan jumlah anggaran dari pemerintah untuk implementasi kebijakan tersebut sangat terbatas. Peneliti menilai bahwa masih kurangnya jumlah staf dan kurangnya anggaran dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, membuat faktor sumberdaya menjadi pengaruh negatif dalam implementasi kebijakan tersebut.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, Dinas Pasar Kota Semarang sebagai implementor kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang memiliki komitmen dan dedikasi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Dinas Pasar Kota Semarang selalu berusaha

semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Peneliti menilai bahwa disposisi menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dapat dinilai dengan adanya SOP sebagai pedoman implementor kebijakan dalam bertindak, dan bagaimana prosedur birokrasinya agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil penelitian SOP dalam proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dirasa sudah berjalan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Semarang dan sudah efektif. prosedur birokrasi disini ditunjukkan dengan adanya koordinasi antar setiap bidang/organisasi. Koordinasi dilakukan secara rutin demi meningkatkan pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun agar koordinasi berjalan dengan baik maka setiap bidang/organisasi harus mengerti tugas-tugasnya dan hubungannya antar bidang/organisasi agar tidak timbul kesalah pahaman. Peneliti menilai bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar

tradisional di Kota Semarang menjadi pengaruh positif.

e. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang mendapat dukungan dari kelompok-kelompok sosial, elit politik dan ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan. Dukungan dari segi sosial dalam proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah dengan adanya kelompok-kelompok sosial seperti organisasi pedagang pasar hingga pemerhati cagar budaya yang ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dukungan dari segi politik, proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah berupa usulan anggaran dari anggota dewan kepada pemberi anggaran untuk pembangunan pasar di Kota Semarang. Segi ekonomi juga turut mendukung adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Karena dengan adanya kebijakan tersebut dapat membuat kondisi ekonomi di Kota Semarang dapat meningkat.

Peneliti menilai bahwa kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

f. Sasaran dan Standar Kebijakan
 Standar dan sasaran kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah diatur dalam peraturan daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional. Dari hasil penelitian menurut para informan bahwa standar dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah dengan adanya SOP dan sasaran kebijakannya adalah seluruh pedagang pasar di Kota Semarang. Sudah jelasnya standar dan sasaran kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang bukan berarti semua sudah terpenuhi, karena dalam pelaksanaannya pedagang pasar yang menjadi sasaran kebijakan tersebut masih ada yang tidak mematuhi aturan sehingga membuat standar dan sasaran kebijakannya belum tercapai dengan baik. Peneliti menilai bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang menjadi pengaruh yang negatif.

pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat.

2. Ketepatan pelaksana,

- a. Pelaksana kebijakan pengaturan pasar tradisional adalah Dinas Pasar kota Semarang, Dinas lain yang terkait serta organisasi pedagang pasar tradisional kota semarang.
- b. Pengaruh dari aktor-aktor dalam kebijakan pemanfaatan pasar di Kota Semarang masih kurang.
- c. Ketepatan pelaksana dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat.

3. Ketepatan target,

- b. Target implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat yaitu pedagang pasar tradisional. Dapat dikatakan tepat karena locus dari kebijakan tersebut adalah pasar tradisional di Kota Semarang, jadi yang menjadi target kebijakannya adalah seluruh pedagang pasar tradisional di Kota Semarang.
- c. Pedagang masih belum siap untuk diintervensi karena banyak pedagang yang masih kurang peduli terhadap kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.
- d. Ketepatan target dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat.

4. Ketepatan lingkungan,

- a. Lingkungan internal yang dilakukan antar aktor implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang diwujudkan dengan adanya koordinasi antar dinas terkait, namun

PENUTUP

A. Kesimpulan

I. Keefektifan Implementasi Kebijakan

1. Ketepatan kebijakan,

- a. Sejauh ini tingkat capaian pemecahan masalah implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang masih rendah.
- b. Kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah dirumuskan sesuai dengan karakter permasalahan yang ada di lapangan.
- c. Ketepatan kebijakan implementasi kebijakan

- koordinasinya masih kurang baik.
- b. Lingkungan eksternal
 - 1) Masyarakat memiliki persepsi implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang akan memberikan dampak yang baik jika dilaksanakan dengan benar.
 - 2) Pedagang menganggap implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang akan merugikan pedagang, karena pemindahan lapak dagang dapat mengurangi pelanggan.
 - c. Ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah tepat.
5. Ketepatan proses,
- a. Proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang di mulai dari identifikasi, lalu sosialisasi baru kemudian pelaksanaan kebijakan.
 - b. Masyarakat dan pedagang masih belum memahami kebijakan pemanfaatan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, karena proses sosialisasinya kurang maksimal.
 - c. Pedagang belum siap untuk melaksanakan kebijakan pengaturan pasar tradisional, karena harus pindah tempat berjualan dan harus mengurus beberapa hal untuk pelaksanaan kebijakan tersebut
 - d. Ketepatan proses dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang belum tepat.
- II. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi
1. Komunikasi
 - a. Transmisi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan tidak efektif. Karena masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan informasi.
 - b. Kejelasan dalam implementasi kebijakan pemanfaatan masih belum jelas.
 - c. Konsistensi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan masih kurang. Pedagang jarang mendapatkan pengarahan dari pihak terkait.
 - d. Komunikasi menjadi pengaruh negatif dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.
 2. Sumberdaya
 - a. Staf dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang memiliki kualitas yang sudah cukup baik, karena setiap staf sudah menguasai bidangnya masing-masing dalam menjalankan tugas, tapi jumlahnya masih kurang banyak karena tidak sebanding dengan jumlah pedagang yang sangat banyak.
 - b. Sumberdaya informasi dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang No 9 tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional. Karena disitu dijelaskan mengenai kebijakan pemanfaatan pasar.
 - c. Fasilitas dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dirasa masih kurang karena anggaran yang diberikan sangat terbatas.
 - d. Sumberdaya menjadi faktor yang menjadi pengaruh buruk dalam implementasi kebijakan

pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

3. Disposisi

- a. Implementor kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah memberikan respon yang cukup baik. Karena selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- b. Sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sudah baik, ditandai dengan adanya komitmen, dedikasi, tanggungjawab dan ketegasan.
- c. Disposisi menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

4. Struktur birokrasi

- a. SOP dalam proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dirasa sudah berjalan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Semarang dan sudah efektif.
- b. Prosedur birokrasi ditunjukkan dengan adanya koordinasi antar setiap bidang/organisasi. Namun masih harus ditingkatkan agar tidak ada kesalah pahaman.
- c. Struktur birokrasi menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

- a. Dukungan dari segi sosial dalam proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah dengan

adanya kelompok-kelompok sosial yang ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

- b. Dukungan dari segi politik dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah berupa usulan anggaran dari anggota dewan kepada pemberi anggaran untuk pembangunan pasar di Kota Semarang.
- c. Segi ekonomi juga turut mendukung adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, karena dengan adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dapat membuat kondisi ekonomi di Kota Semarang meningkat.
- d. Kondisi sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor yang memberikan pengaruh positif dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

6. Standar dan Sasaran

- a. Standar dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah dengan adanya SOP dan sasaran kebijakannya adalah seluruh pedagang pasar di Kota Semarang.
- b. Tingkat kejelasan dan ukuran dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional.
- c. Standar dan sasaran kebijakannya belum tercapai dengan baik.
- d. Standar dan sasaran kebijakan menjadi pengaruh negatif dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

B. Saran

I. Keefektifan Implementasi Kebijakan

1. Dengan masih banyaknya kondisi pasar yang berantakan, masih ada pedagang yang berjualan tidak sesuai zonasinya dan pemeliharaan bangunan pasar yang kurang, maka implementor harus sering melakukan monitoring ke seluruh pasar secara rutin sehingga dapat langsung diketahui apa penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan.
2. Setiap aktor memiliki tugas dan peran masing-masing, oleh karena itu setiap aktor harus meningkatkan pemahaman dalam tugas-tugasnya dan melakukan koordinasi kepada aktor lainnya agar maksimal dalam menjalankan tugasnya dan dapat meningkatkan perannya. Sehingga aktor tersebut memiliki pengaruh yang baik terhadap implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.
3. Agar pedagang siap dalam menjalankan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang maka pemerintah harus memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pedagang dan memberikan jaminan bahwa dengan menjalankan kebijakan tersebut tidak akan merugikan pedagang.
4. Dalam lingkungan internal kebijakan harus mengadakan rapat rutin untuk membahas rencana-rencana dalam melaksanakan tugas. Sehingga koordinasi antar SKPD terkait dapat maksimal.
5. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai

kebijakan pengaturan pasar tradisional, maka pemerintah harus meningkatkan sosialisasi, dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan lembaga / organisasi yang dekat dengan masyarakat seperti kelurahan, RT/RW untuk melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

1. Transmisi dalam komunikasi implementasi kebijakan pemanfaatan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang seharusnya dilakukan secara terdata, agar seluruh pedagang mendapatkan informasi. Jadi dalam penyebaran informasi ada data siapa saja yang sudah mendapat informasi dan siapa saja yang belum mendapatkan informasi, sehingga pedagang benar-benar mendapatkan informasi yang jelas. Untuk memperjelas informasi tersebut maka juga diperlukan adanya peningkatan komitmen implementor kebijakan dalam memberikan informasi secara rutin.
2. Dengan minimnya jumlah staf dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang maka perlu diadakannya peningkatan keahlian staf yang ada dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan.
3. Dalam struktur birokrasi harus ada kerjasama yang baik antar setiap bidang/organisasi. Oleh karena itu koordinasi antar setiap bidang/organisasi harus ditingkatkan untuk menghindari kesalah pahaman.

4. Standar dan sasaran kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang akan dapat terpenuhi jika pedagang mau menaati peraturan, oleh karena itu implementor harus meningkatkan ketegasan dan menegakkan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik : Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu Edisi 2*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho D., Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional
- <http://semarangkota.go.id/main/menu/11/profil-kota-semarang/profil-kota>